

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan setiap tahunnya mencerminkan tingginya potensi keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Apabila sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah dimanfaatkan dan dikelola secara optimal maka akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.
2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Tinggi rendahnya belanja modal tidak memberikan dampak yang besar terhadap kinerja keuangan. Selain itu, Belanja modal belum

mampu mendukung kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022 karena tidak sepenuhnya terfokus pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan sarana fisik pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari Belanja Modal belum tercermin secara positif dalam peningkatan kinerja keuangan daerah sehingga menyebabkan pencapaian kinerja keuangan daerah yang optimal belum tercapai.

3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022 Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, semakin besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. Akibatnya, kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi lokalnya menjadi semakin terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dana perimbangan dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. SiLPA tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah yang efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan sehingga memiliki dampak yang minim dari SiLPA karena

pemerintah daerah Sumatera Barat dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat waktu.

5. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2022

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang signifikan setiap tahunnya menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi keuangan yang tinggi. Jika pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efisien sehingga dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang efektif. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah belum mampu menarik motivasi publik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, realisasi belanja modal yang cenderung lambat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah menyebabkan belanja modal belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini yang menyebabkan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena dapat menciptakan ketergantungan pada penerimaan dana dari pemerintah pusat. Apabila semakin besar alokasi dana

perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka, semakin besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. SiLPA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah secara efisien .

5.2 **Saran**

Adapun saran peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
 1. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat perlu memperbaiki pendapatan asli daerah untuk meningkatkan tingkat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan pendapatan asli daerah yang sudah ada secara efisien untuk mendukung kegiatan yang memperbaiki produktivitas dan ekonomi daerah. Peningkatan produktivitas dapat menciptakan sumber pajak dan retribusi baru, sehingga pendapatan asli daerah meningkat dan kinerja keuangan daerah juga meningkat.
 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan alokasi modal belanja terhadap total belanja daerah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerah. Dengan memastikan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai, produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan dan aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat dipermudah. Oleh karena itu,

peningkatan alokasi modal belanja dan efisiensi pengelolaan belanja daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

3. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat juga perlu mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dengan memanfaatkan dana tersebut secara efektif untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaan kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan ekonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan pada periode-periode selanjutnya, peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengurangi kebutuhan akan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga tingkat ketergantungan daerah dapat berkurang dan kinerja keuangan daerah meningkat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Untuk mendapatkan hasil yang valid, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih panjang, misalnya sepuluh tahun, untuk memperoleh sampel yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti Size, Leverage, dan Ukuran Pemerintah.